

**KEMENTERIAN AGAMA**



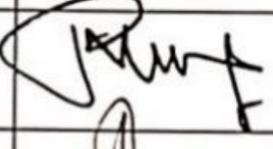
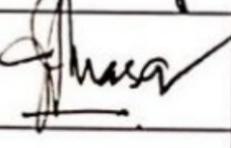
# **RENCANA STRATEGIS**

2020 - 2024

**INSTITUT AGAMA  
HINDU NEGERI GDE  
PUDJA MATARAM**

	IAHN GDE PUDJA MATARAM	Kode/Nomor: IAHN Gde Pudja Mataram
	Jl. Pancaka 7B Mataram (0370) 628382. Fax. (0370) 631725	Tanggal: April 2022
	RENSTRA	Revisi: 0 Halaman 1 dari 30

RENCANA STRATEGIS  
IAHN GDE PUDJA MATARAM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd.,S.Ag.,M.Si.	Ketua Tim Penyusun		29/2/ 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. I Wayan Sumertha, M.Ag.	Wakil Rektor I		25/2/22
3. Persetujuan	Drs. I Ketut Nuasa, M.Ag.	Ketua Senat		25/2. 22
4. Penetapan	Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,S.E.,M.Si.	Rektor IAHN Gde Pudja Mataram		25/2/22



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM  
NOMOR 502 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2020-2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan visi, misi tujuan dan berbagai kebijakan serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu empat tahun, dipandang perlu menetapkan RENSTRA Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2020-2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Periode 2020-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);  
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TAHUN PERIODE 2020-2024.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Wakil Rektor I I Wayan Sumertha	Kepala Biro AUAK I Gusti Nyoman Artawan	Wakil Rektor II Ni Putu Sudewi Budhawati
Pf	A	J

- KEDUA : RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Menjadi pedoman dalam:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2020-2024;
  - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram setiap tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram,  
pada Tanggal 22 April 2022



REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI  
GDE PUDJA MATARAM,

*I Wayan Wirata*  
I WAYAN WIRATA

Wakil Rektor I I Wayan Sumertha	Kepala Biro AUAK I Gusti Nyoman Artawan	Wakil Rektor II Ni Putu Sudewi Budhawati
<i>rs</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

## Kata Pengantar

*Om Swastyastu*

Perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram menjadi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram pada tahun 2020 merupakan tonggak sejarah bagi umat Hindu di Indonesia pada umumnya dan bagi umat Hindu di Provinsi NTB pada khususnya, yang menandai perhatian dan kehadiran Negara terhadap umat beragama minoritas di Indonesia.

Perubahan bentuk tersebut menandakan perkembangan terutama pada bidang pendidikan keagamaan khususnya tingkat pendidikan tinggi. Dengan perubahan tersebut maka dimungkinkan untuk mengembangkan spectrum keilmuan yang diasuh lembaga dari satu rumpun keilmuan tertentu menjadi berbagai macam rumpun keilmuan yang didalamnya termasuk rumpun-rumpun keilmuan yang bersifat umum. Hal ini merupakan peluang besar bagi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram untuk dapat mengembangkan diri dengan membuka program-program studi yang beragam yang memungkinkan masyarakat untuk memilih sesuai dengan bidang yang dianggapnya dapat memberikan kontribusi praktis sehingga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan umat Hindu secara keseluruhan.

Untuk dapat memenuhi tantangan tersebut, maka Rencana Strategis IAHN Gde Pudja periode 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan aspek-aspek perubahan eksternal dan dinamika internal dalam rangka untuk meningkatkan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi bagi pendidikan tinggi keagamaan Hindu dengan mengacu kepada sasaran-sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Agama dan diturunkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan-Nya bagi kita dalam melaksanakan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini.

Mataram, 22 April 2022

Ketor



*I Wayan Wirata*

I Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Si

NIP. 196608052003121002

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	3
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN .....	6
2.1 Tujuan Kementerian Agama .....	6
2.2 Sasaran Strategis Kementerian Agama .....	6
2.3 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.....	8
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	12
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Eselon I .....	12
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTKN .....	19
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	26
4.1 Target Kinerja .....	26
4.2 Kerangka Pendanaan .....	28
BAB V. PENUTUP .....	30

## BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini mendeskripsikan penyusunan rencana strategis Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini disusun berlandaskan pada evaluasi rencana strategis Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram periode 2015-2019 yang meliputi kondisi umum, potensi, dan permasalahan.

### 1.1. Kondisi Umum

Pada Renstra STAHN Gde Pudja 2015-2019 sebelum mengalami alih status, tujuan pendidikan tinggi menjadi acuan penting bagi IAHN Gde Pudja Mataram dalam berperan serta mengembangkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan visi “sebagai pusat kajian Hindu yang unggul dan berdaya saing”. Berdasarkan visi tersebut disusun 3 poin misi untuk dapat mewujudkannya yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis agama dan budaya Hindu, IPTEK, dan seni;
2. Mengembangkan pola berfikir ilmiah dalam penelitian dan pengkajian Hindu; dan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wahana aplikasi bidang keilmuan dan kepekaan terhadap lingkungan.

Misi pertama yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis agama dan budaya Hindu, IPTEK, dan seni bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang memiliki karakter yang lekat dengan nilai-nilai agama dan budaya Hindu namun tetap memiliki kemampuan penguasaan IPTEK yang mumpuni serta turut serta melestarikan nilai-nilai tersebut melalui kegiatan seni yang dapat memperhalus rasa.

Untuk dapat memenuhi misi ini maka IAHN Gde Pudja telah melaksanakan tinjauan-tinjauan terhadap kurikulum yang berlaku agar dapat menghasilkan luaran dengan standard kompetensi yang pada garis besarnya adalah lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif yang imotivasi dan dilandasi oleh etika yang berasal dari agama Hindu yang melekat kuat dalam karakter yang dimilikinya.

Penggunaan IPTEK sebagai sarana pembelajaran dan sumber referensi serta sebagai sarana penunjang pembelajaran lainnya telah semakin ditingkatkan agar civitas akademika memiliki kemampuan IPTEK yang tidak tertinggal di tengah kencangnya perubahan dan perkembangan teknologi.

Kualifikasi lembaga pendidikan juga mengalami peningkatan dengan terakreditasinya sebagian besar Program Studi sejak masih sebagai lembaga pendidikan STAHN Gde Pudja Mataram dan bahkan beberapa dengan peringkat A. Ini membuktikan bahwa usaha-usaha untuk mencapai standarisasi lembaga pendidikan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan secara nasional sedikit demi sedikit telah dapat dicapai. Tentu saja hal ini masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan agar selalu relevan dengan tuntutan standard Perguruan Tinggi yang semakin lama semakin kompleks sesuai tuntutan zaman.

Pencapaian tersebut diatas pada akhirnya berimbas pada perubahan status perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi institut melalui *perpres nomor 21 tahun 2020*. Hal ini menjadi potensi dan sekaligus tantangan ke depan bagi lembaga untuk terus mengembangkan diri ke arah yang semakin baik dalam berbagai aspek yang dimilikinya.

Pentingnya landasan etis estetis dalam membentuk karakter peserta didik diwujudkan dalam kurikulum yang bermuatan seni dan pada puncaknya membentuk sebuah Program Studi Seni dan Budaya Hindu. Di sisi lain, fasilitas untuk melatih dan mengembangkan seni

keagamaan Hindu juga terus ditambah dan dikembangkan untuk dapat mendorong kreatifitas Mahasiswa dan Dosen dalam bidang seni.

Misi kedua adalah mengembangkan pola pikir ilmiah dalam penelitian dan pengkajian Hindu bertujuan untuk membentuk insan akademis yang memiliki pola pikir yang logis dan metodologis yang kemudian dapat diaplikasikan untuk melakukan kajian-kajian tentang Hindu sebagai agama maupun sebagai sebuah entitas dari budaya, seni dan sejarah melalui perspektif ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk melaksanakan misi kedua ini, lembaga banyak melaksanakan kegiatan penelitian maupun pengkajian ilmiah dalam bentuk seminar atau pun lokakarya berstandar regional maupun nasional. Hal ini dilengkapi juga dengan melaksanakan penerbitan ilmiah dan terjemahan beberapa judul lontar sebagai bentuk kajian terhadap salah satu sumber ajaran agama Hindu yang dibalut oleh *local genius*. Posisi kehidupan keagamaan masyarakat Hindu di Lombok pada khususnya dalam keadaannya sebagai minoritas dan memiliki variasi budaya keagamaan yang sedikit berbeda coraknya dengan yang berkembang di Bali merupakan ladang penelitian dan pengkajian yang masih tersedia luas dan memerlukan perhatian yang besar sebab dari situlah pengembangan masyarakat berdasarkan kearifan local dapat dirumuskan dengan tepat sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bumi.

Penerbitan ilmiah berupa jurnal dikembangkan ke arah jurnal online (OJS) dan peningkatan mutu isi dari jurnal tersebut. Jurnal sebagai sarana akademisi untuk menunjukkan hasil karya ilmiahnya merupakan perangkat vital dalam pengembangan sebuah perguruan tinggi dan sekaligus berfungsi sebagai barometer kemampuan analisis ilmiah dari insan akademis di dalamnya dan sekaligus juga sebagai sarana pertukaran hasil pemikiran dari rekan-rekan sejawat sehingga dalam mendukung misi yang kedua tersebut maka jurnal ilmiah mendapat perhatian yang cukup besar dalam pembiayaan percetakan penerbitan, pelatihan-pelatihan penulisan artikel jurnal dan sistem elektronik jurnal ilmiah. Selain itu, akreditasi jurnal ilmiah terus diusahakan agar lembaga dapat memiliki jurnal yang bereputasi di dunia akademik.

Peningkatan mutu penelitian tidak bisa dilepaskan dari kualifikasi dan kompetensi peneliti yang dalam hal ini adalah tenaga Dosen. Untuk mendukung hal itu, pembiayaan pendidikan untuk Dosen guna menempuh studi yang lebih tinggi (strata 3) terus dilakukan setiap tahun. Langkah ini berhasil meningkatkan komposisi Dosen dengan pendidikan strata 3 dengan jumlah selama periode kelulusan 2015-2019 yang berarti bahwa kekuatan tenaga pengajar di STAHN Gde Pudja sebelum menjadi institut mulai dapat diandalkan untuk menjadi sumber daya yang unggul dan berdaya saing.

Misi ketiga yaitu melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wahana aplikasi keilmuan dan kepekaan terhadap lingkungan jelas merupakan suatu bentuk aplikasi nyata dan praktis yang merupakan transformasi bentuk keilmuan menjadi sumbangsih nyata kepada masyarakat yang sekaligus juga berfungsi agar civitas akademika memiliki wawasan tentang kenyataan yang dihadapinya di lingkungan sekitar mereka.

Pengabdian masyarakat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan bhakti sosial ke lokasi-lokasi masyarakat Hindu baik di Provinsi NTB maupun di luar daerah seperti Sulawesi Selatan Maluku. Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa merupakan bentuk aplikasi keilmuan secara nyata kepada masyarakat dan bentuk partisipasi dalam membina umat dalam hal keagamaan, sosialisasi moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia Hindu. Bhakti sosial yang dilakukan bertujuan untuk menyalurkan bantuan-bantuan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pada saat terjadinya bencana Gempa Lombok bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana

Tabel 1. Jumlah Penelitian Periode 2015-2019

No.	Jenis Penelitian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Individu S3 Kompetitif	5	3	10	6	6
2	Individu S3 Non-Kompetitif	3	9	0	3	7
3	Individu S2 Kompetitif	15	5	20	5	5
4	Individu S2 Non-Kompetitif	32	39	0	27	28
5	Kelompok	11	15	6	2	4

Tabel 2. Jumlah Pengabdian Periode 2015-2019

No.	Data Lokasi Pengabdian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lokasi dalam Kota	3	6	6	9	9
2	Jumlah Lokasi Luar Kota	2	0	0	5	9

Tabel 3. Jumlah Dosen dengan Kualifikasi Pendidikan S3

No.	Data	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Dosen dengan Kualifikasi Pendidikan S3	14	15	17	17	18

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Sebagai perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri satu-satunya di Provinsi NTB, IAHN Gde Pudja memiliki beban moral yang besar dalam ikut serta mengembangkan Hindu dalam pengertian agama, entitas budaya maupun terutama sumber daya manusia. Dalam rangka turut serta mengembangkan agama Hindu, visi IAHN Gde Pudja Mataram untuk menjadi pusat kajian Agama Hindu yang unggul dan berdaya saing sangat relevan. Banyak fenomena agama dan keagamaan di masyarakat yang menimbulkan polemik internal maupun eksternal yang dapat menjadi potensi gangguan dalam harmoni kehidupan masyarakat secara keseluruhan yang perlu segera diatasi dengan berbagai langkah-langkah strategis secara holistik dan integratif. Rujukan-rujukan ilmiah sangat diperlukan oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan dan hal tersebut merupakan peran sentral yang dapat selalu diisi oleh IAHN Gde Pudja Mataram. Untuk itu potensi pengembangan pusat kajian dan penelitian ilmiah agamadan keagamaan Hindu menjadi salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam rencana strategis ini.

Kerjasama trilateral antara Bidang Hindu Kanwil Kementerian Agama sebagai otoritas birokrasi, PHDI sebagai lembaga masyarakat dan IAHN Gde Pudja Mataram sebagai lembaga pendidikan tinggi secara bersama-sama dapat mendorong perkembangan pemahaman agama dan kehidupan beragama masyarakat Hindu di NTB. Untuk itu penguatan dan pengembangan kerjasama di berbagai bidang dengan kedua lembaga terkait tersebut harus dapat terus dibina dan diintensifkan untuk dapat memberi kontribusi positif dan nyata bagi masyarakat Hindu di NTB.

Peningkatan sumber daya manusia umat Hindu di NTB juga merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dengan prioritas yang tinggi. Lemahnya sumber daya manusia umat Hindu menjadi suatu penghalang dalam mencapai umat Hindu yang berdaya saing dan kelemahan tersebut dapat diatasi dengan pendidikan. Posisi IAHN Gde Pudja Mataram dalam hal ini sangatlah potensial sebagai sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia umat Hindu di NTB atau pun dari luar daerah secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya IAHN Gde Pudja memiliki kewajiban untuk mendidik umat Hindu menjadi manusia yang berkompentensi unggul dengan kualifikasi memadai sedangkan secara tidak langsung adalah dengan memberikan bekal ilmu kepada Mahasiswa yang dididiknya untuk kemudian disebarluaskan dan diaplikasikan kepada masyarakat baik sebagai guru maupun dalam peran kemasyarakatan lainnya.

Dalam rangka memanfaatkan dan mengembangkan potensi tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi seperti dipaparkan sebagai berikut; Yang pertama adalah permasalahan regulasi baik regulasi tingkat lembaga atau pun regulasi tingkat yang lebih tinggi. Ketiadaan atau ketidaklengkapan regulasi sebagai payung hukum bagi pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu menyebabkan keraguan yang timbul dari pertimbangan atas konsekuensi hukum yang dapat diterima. Hal ini tentu dapat menunda atau bahkan membatalkan sebuah kegiatan walaupun jelas bahwa kegiatan tersebut dibutuhkan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan. Hambatan ini juga termasuk regulasi yang memayungi tentang kerjasama-kerjasama yang dapat dilakukan dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga baik dengan pihak pemerintah maupun dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga keagamaan.

Hambatan yang kedua adalah tentang kompetensi sumber daya manusia yang masih sering dirasa kurang memadai baik dari segi kualitas maupun dari segi jumlah. Dari segi kualitas menyangkut penguasaan kepakaran pada suatu bidang yang masih perlu ditingkatkan baik melalui peningkatan strata pendidikan maupun dengan dilaksanakannya pelatihan-pelatihan praktis yang menunjang pekerjaan. Sebagai contoh disini dapat disebutkan misalnya minimnya penguasaan teknologi untuk dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar atau kegiatan penelitian. Penguasaan bidang teknologi juga memiliki tuntutan yang

sama di tingkat peserta didik untuk dapat mendukung sistem pembelajaran menggunakan daring atau internet sebagai media pembelajaran.

Dari segi kuantitas sumber daya manusia juga perlu untuk ditingkatkan jumlahnya untuk menambah bidang-bidang kepakaran yang belum dimiliki saat ini. Penambahan sumber daya manusia ini perlu dilakukan baik sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan agar kompleksitas kerja yang dituntut dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dapat teratasi.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### 2.1. Tujuan Kementerian Agama

Seperti termuat dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tujuan Kementerian Agama meliputi:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

### 2.2. Sasaran Strategis Kementerian Agama

Ada pun Sasaran Strategis yang dicanangkan Kementerian Agama dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 adalah:

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Agama menetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama

2. Tujuan 2: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya.

3. Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Indeks kepuasan layanan KUA; 2. Tingkat kepuasan layanan produk halal; dan 3. Indeks kepuasan layanan ibadah haji
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan.

4. Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: a. Literasi; dan b. Numerasi 2. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: a. Membaca; dan b. Matematika; dan c. Sains
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	1. APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha; 2. APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; 7. APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman; dan 8. APK PTK/Ma'had Aly.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B; 2. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; 3. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; dan 4. Persentase PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul.
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa

5. Tujuan 5: Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional; 2. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; 3. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional; dan 4. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi.

6. Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	1. Predikat opini laporan keuangan; dan 2. Nilai reformasi birokrasi.
SS13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan ( <i>Policy Paper</i> )

### 2.3. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, tahun 2020 telah ditetapkan beberapa Sasaran Program untuk 12 Program di Kementerian Agama. Sebagai acuan dalam Renstra ini akan dipetik Program yang sesuai yaitu Program no 9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu.

Sasaran program (Outcome):

- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu dengan indikator kinerja program:
  - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu; dan
  - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
  - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
  - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
  - 1) rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama; dan
  - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
  - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
  - 2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.

- i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
  - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
  - 3) persentase dosen berkualifikasi S3
  
- j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman;
  - 2) persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman;
  - 3) persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman;
  - 4) persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman; dan
  - 5) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
  
- k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
  
- l. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SNP;
  - 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
  - 3) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan; dan
  - 4) persentase PTKH yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
  
- m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
  - 1) Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
  
- n. meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
  - 1) persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional.
  
- o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
  - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
  - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
- p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
- 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
- q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
  - 5) Indeks Profesionalitas ASN.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Eselon I

Ditjen Bimas Hindu menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan dalam lima tahun ke depan berdasarkan pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta kebijakan Kementerian Agama dalam Renstra yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebijakan dimaksud bertujuan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia khususnya umat Hindu dengan fondasi internalisasi nilai-nilai agama Hindu yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Kebijakan dan strategi Ditjen Bimas Hindu tahun 2020-2024 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan Agama Hindu.

Adapun strateginya adalah:

- Pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama Hindu sekaligus sebagai agen siar dharma dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat Hindu;
- Peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat Hindu;
- Peningkatan umat Hindu yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok binaan penyuluh agama Hindu;
- Penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama Hindu;
- Pemberdayaan kelompok sasaran penyuluh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Hindu;
- Peningkatan pembinaan pelayanan terhadap keluarga umat Hindu dalam mewujudkan keluarga sukhinah dengan nilai-nilai agama Hindu.

##### 2. Kebijakan dalam peningkatan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu

Dalam rangka mewujudkan moderasi beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- Peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama Hindu yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- Peningkatan frekuensi forum dialog dengan tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi inter umat beragama Hindu;
- Peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
- Peningkatan pembinaan kepada desa kerukunan inter umat beragama;

3. Peningkatan kualitas pembinaan moderasi beragama dalam mewujudkan moderasi beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah :

- Peningkatan pembinaan kepada penyuluh agama Hindu yang berwawasan moderat sebagai garda depan di masyarakat yang memberikan penyuluhan agama kepada umat Hindu;
- Peningkatan jumlah penyuluh melalui penyuluh agama Hindu non PNS;
- Pemberian Tunjangan kepada penyuluh non PNS yang tersebar diseluruh Indonesia;
- Pemberian Diklat kepada penyuluh agama Hindu non PNS bekerjasama dengan Badan Diklat Kemenag dalam pelaksanaannya;
- Penerbitan pedoman kepada penyuluh agama Hindu dalam pelaksanaan tugasnya.

4. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- Pembinaan lembaga agama dan keagamaan sebagai media dalam memberikan pembinaan kepada umat Hindu, dimana lembaga agama dan keagamaan ini diharapkan mampu memberikan :
  - Praktik unsur-unsur budaya agar tidak bertentangan ajaran ajaran agama;
  - Penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, milenial, dan akademisi;
  - Pengembangan tafsir agama dalam konteks budaya;
  - Penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
  - Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
  - Pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat;
  - Pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
- Pemberian bantuan operasional kepada lembaga agama dan keagamaan agar senantiasa dapat terus beroperasi untuk membantu pemerintah dalam memberikan pembinaan.
- Pembinaan melalui kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama seperti Utsawa Dharmagita dan Festival Keagamaan Hindu.

5. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan layanan keagamaan melalui sarana dan prasarana keagamaan serta penyediaan rumah ibadah yang suci dan damai. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- Digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;

- Pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
  - Peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (frontline) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
  - Peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital; peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
  - Peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
  - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
  - Peningkatan dalam penyediaan rumah ibadah yang suci dan damai;
  - Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah dan pengelola perpustakaan rumah ibadah;
  - Peningkatan siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan di ruang publik.
6. Peningkatan kualitas penerimaan dana keagamaan Hindu melalui lembaga ekonomi keagamaan Hindu yang dimanfaatkan untuk mendukung untuk pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut :
- Penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat Hindu;
  - Meningkatnya pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana punia;
  - Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan (dharma dana);
  - Peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
  - Peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan (dana punia) di lembaga dan rumah ibadah;
  - Peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan (dana punia) kepada masyarakat.
7. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat pada setiap satuan pendidikan, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan rerata nilai ujian sekolah pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman dan rerata nilai ujian mata kuliah pada PTKH yang bermuatan moderasi, melalui strategi:
- Peningkatan kompetensi guru agama Hindu;
  - Peningkatan guru berkualifikasi S1/S2;
  - Penguatan dan pemberdayaan KKG/MGMP;
  - Pemberian Bantuan pada sekolah minggu/pasraman;
  - Penyempurnaan kurikulum agar bermuatan moderasi beragama;
  - Peningkatan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan pada PTKH.

8. Peningkatan kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kebijakan diarahkan untuk peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut :

- Menerapkan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
- Penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
- Penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu;
- Peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran;
- Penyelenggaraan asesmen kompetensi untuk siswa (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
- Peningkatan buku dan media pembelajaran yang disediakan;
- Pemberian tunjangan berdasarkan kinerja kepada guru pada sekolah keagamaan di setiap satuan pendidikan (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman).

9. Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan, strategi yang dilakukan adalah :

- Peningkatan jumlah guru yang bersertifikat pendidik;
- Peningkatan jumlah dosen yang bersertifikat pendidik;
- Peningkatan jumlah guru agama Hindu pada sekolah umum maupun sekolah keagamaan yang mengikuti PPG;
- Peningkatan jumlah Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi;
- Pemberian beasiswa S2 untuk calon pengawas dan kepala sekolah keagamaan Hindu (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
- Peningkatan jumlah dosen non PNS penerima Tunjangan Profesi Dosen Non PNS;
- Peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi S3;
- Peningkatan jumlah dosen yang menerima sertifikasi Dosen;
- Peningkatan jumlah dosen non PNS yang menerima Tunjangan Fungsional Dosen Non PNS;
- Pembinaan kompetensi pada tenaga kependidikan di PTKH.

10. Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan, kebijakan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan jumlah siswa pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman setiap tahunnya. Strategi yang diambil adalah:

- Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Tk Pratama/Adhi/Madya/Utama Widya Pasraman;
- PIP Tk Adhy/Madya/Utama Widya Pasraman;
- Pembangunan Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman di daerah afirmasi/3T;
- PIP Kuliah;
- Pemberian Beasiswa Bidik Misi;
- Pemberian Beasiswa Prodi Langka;
- Pemberian Beasiswa Mahasiswa Miskin;
- Pemberian Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
- BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri).

11. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi SNP. Kebijakan yang diambil adalah dengan pemenuhan jumlah guru yang memenuhi SNP per jenjang di setiap daerah. Strategi yang diambil adalah :

- Data guru agama Hindu yang akurat;
- Data sebaran umat Hindu/peserta didik yang akurat;
- Peningkatan kompetensi guru;
- Peningkatan sebaran akses pendidikan setiap satuan pendidikan;
- Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah daerah;
- Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi minimal.

12. Peningkatan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Kebijakan yang diambil adalah dalam rangka peningkatan jumlah sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang memenuhi standard nasional pendidikan serta peningkatan jumlah PTKH yang mendapatkan akreditasi. Dalam pencapaiannya melalui strategi :

- Bantuan sarana dan prasarana pendidikan agar sekolah dan PTKH memenuhi SPM sarana dan prasarana;
- Peningkatan penjaminan mutu pada sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) sesuai dengan SNP;
- Peningkatan jumlah sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang telah mendapatkan akreditasi;
- Penerapan metode pembelajaran daring pada sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);

- Peningkatan jumlah siswa (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional;
  - Implementasi Merdeka Belajar di sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
  - Peningkatan penjaminan mutu pada PTKH;
  - Peningkatan jumlah PTKH yang telah mendapatkan akreditasi minimal A;
  - Penerapan metode pembelajaran daring pada PTKH;
  - Pelaksanaan PPG pada LPTK;
  - Peningkatan jumlah mahasiswa PTKH yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional;
  - Implementasi Kampus Merdeka pada PTKH.
13. Penguatan pendidikan karakter siswa. Kebijakan yang diambil adalah peningkatan karakter siswa dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- Pelaksanaan program pendidikan karakter di sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) seperti Pasraman kilat dan Jambore Pasraman;
  - Peningkatan jumlah sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang Ramah Anak;
  - Kegiatan ekstrakurikuler Kepramukaan di sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman).
14. Peningkatan kualitas PTKH yang bereputasi internasional. Dilakukan melalui kebijakan peningkatan jumlah PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional. Strategi yang diambil adalah :
- Peningkatan jumlah PTKH yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional;
  - Peningkatan PTKH yang melakukan kolaborasi Internasional;
  - Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.
15. Peningkatan kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja. Kebijakan yang diambil adalah dengan PTKH bekerjasama dengan dunia kerja/industri dan peningkatan Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa agar dapat menurunkan rerata masa tunggu lulusan PTKH memperoleh pekerjaan. Strategi yang diambil adalah:
- Peningkatan pembinaan kepada peserta didik;
  - Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat;
  - Peningkatan program magang;
  - Peningkatan ekstrakurikuler di PTKH dalam rangka meningkatkan skill.

16. Peningkatan kualitas pemanfaatan penelitian, kebijakan yang diambil adalah peningkatan jumlah jurnal ilmiah pada PTKH yang terakreditasi nasional. Strategi yang akan dilakukan adalah :

- Peningkatan jumlah hasil penelitian PTKH yang memperoleh HAKI;
- Peningkatan jumlah hasil penelitian PTKH yang menghasilkan hak paten.

17. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang efektif, transparan dan akuntabel. Kebijakan yang diambil adalah dengan meningkatkan tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan, peningkatan nilai PMPRB, peningkatan nilai SAKIP, peningkatan nilai maturitas SPIP dan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN serta peningkatan kualitas administrasi pendidikan keagamaan. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- Peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan jaman;
- Peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi;
- Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- Peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (e-Government);
- Penguatan public campaign/ mainstreaming/ pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB;
- Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- Peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- Peningkatan layanan tanggap darurat;
- Penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map peningkatan kompetensinya;
- Peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- Restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- Penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- Peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- Peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- Penguatan pengawasan internal berbasis kinerja;
- Peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat;

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTKN

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Agama dan Rencana Strategis Ditjen Bimas Hindu tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan tugas fungsi, potensi dan hambatan yang ada, maka arah dan kebijakan strategis PTKN IAHN Gde Pudja Mataram mengacu pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

KODE	URAIAN	SATUAN
<b>SP.5.1</b>	<b>Menguatnya Sistem Pendidikan yang Berprespektif Moderat</b>	
IKSP.5.1.1.	Rerata Nilai Mata Kuliah Pendidikan Agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi agama	Nilai
<b>SP.5.2.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik</b>	
IKSP.5.2.1.	Persentase Dosen bersertifikat Pendidik	%
IKSP.5.2.2.	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	%
<b>SP.5.3.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</b>	
IKSP.5.3.1	Persentase Prodi yang Terakreditasi A/Unggul	%
IKSP.5.3.2	Persentase PTKH yang Melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	%
<b>SP.5.4.</b>	<b>Meningkatnya PTKH yang Bereputasi Internasional</b>	
IKSP.5.4.1.	Persentase PTKH yang Memperoleh Peringkat Reputasi Internasional	%
<b>SP.5.5.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penelitian</b>	
IKSP.5.5.1.	Persentase Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional	%
<b>SP.5.6.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Lulusan PTKH yang Diterima di Dunia Kerja</b>	
IKSP.5.6.1.	Persentase PTKH yang Bekerjasama dengan Dunia Kerja/Industri dalam Seleksi Penempatan Lulusan	%
IKSP.5.6.2.	Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Kelulusan Mahasiswa PTK	
	a. S1	Nilai
	b.S2	Nilai
	c. S3	Nilai
IKSP.5.6.3.	Rerata Masa Tunggu Lulusan PTKH sebelum Memperoleh Pekerjaan	Bulan
<b>5104 PENINGKATAN AKSES, MUTU, KESEJAHTERAAN DAN SUBSIDI PENDIDIKAN TINGGI AGAMA HINDU</b>		
<b>SK 5.5104.1</b>	<b>Meningkatnya Muatan Moderasi Beragama dalam Mata Kuliah Agama</b>	
IKSK 5.5104.1.2	Persentase Mahasiswa PTKH yang Dibina dalam Moderasi Beragama	%
IKSK 5.5104.1.3	Persentase Dosen PTKH yang Dibina dalam Moderasi Beragama	%
<b>SK 5.5104.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas Penerapan Kurikulum dan Metode Pembelajaran Inovatif</b>	
IKSK 5.5104.2.1	Persentase Prodi PTKH yang Menyelenggarakan Pembelajaran Daring	%
<b>SK 5.5104.3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	
IKSK 5.5104.3.1	Persentase Dosen PTKH yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	%
IKSK 5.5104.3.2	Persentase Tenaga Kependidikan PTKH yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	%
<b>SK 5.5104.4</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan</b>	
IKSK 5.5104.4.1	Persentase PTKH yang memenuhi Standar Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi	%
<b>SK 5.5104.5</b>	<b>Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu, Daerah Afirmasi dan Berbakat</b>	
IKSK 5.5104.5.1	Peresentase Mahasiswa PTKH Penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	%
IKSK 5.5104.5.2	Peresentase Mahasiswa PTKH Penerima Beasiswa PPA	%
IKSK 5.5104.5.3	Peresentase Mahasiswa PTKH Berprestasi Lulusan S2 yang Langsung Melanjutkan ke S3	%
<b>SK 5.5104.7</b>	<b>Menguatnya Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi Berdasarkan Hasil Pemetaan</b>	
IKSK 5.5104.7.1	Jumlah PTKH yang Difasilitasi dalam Meningkatkan Status Akreditasi	Lembaga
IKSK 5.5104.7.2	Persentase Prodi PTKH yang Menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	%
<b>SK 5.5104.8</b>	<b>Meningkatnya Budaya Mutu Pendidikan</b>	
IKSK 5.5104.8.1	Persentase PTKH yang Menerapkan Budaya Mutu	%
IKSK 5.5104.8.2	Persentase Mahasiswa PTKH yang Mengikuti Kompetisi Nasional maupun Internasional	%
<b>SK 5.5104.9</b>	<b>Menguatnya Tata Kelola Pemenuhan SPMI Pendidikan</b>	
IKSK 5.5104.9.1	Persentase PTKH yang Memperoleh Pembinaan dalam SPMI	%
<b>SK 5.5104.10</b>	<b>Menguatnya Pembiayaan dan Efektifitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan</b>	
ISK 5.5104.10.1.	Persentase anggaran PNB dan PNB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	%
ISK 5.5104.10.2.	Persentase Peningkatan Alokasi Anggaran BOPTN	%
<b>SK 5.5104.11</b>	<b>Meningkatnya Kualitas PTK berstandar Internasional</b>	
ISK 5.5104.11.1	Persentase Prodi PTKH yang Memenuhi Standar Akreditasi Internasional	%
ISK 5.5104.11.2	Persentase PTKH yang melakukan Kolaborasi Internasional	%
ISK 5.5104.11.3	Persentase Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti bidang Pendidikan dan Pengajaran	%
ISK 5.5104.11.4	Persentase Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti di Bidang Penelitian dan Publikasi	%
ISK 5.5104.11.5	Persentase Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	%
<b>SK 5.5104.12.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian PTK</b>	
ISK 5.5104.12.1	Persentase Penelitian yang memperoleh HAKI	%
ISK 5.5104.12.2	Persentase Penelitian yang menghasilkan hak paten	%
<b>SK 5.5104.13.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Lulusan PTK</b>	
ISK 5.5104.13.1	Persentase Lulusan PTKH yang Tepat Waktu	%
ISK 5.5104.13.2	Rerata lama masa studi Mahasiswa PTKH	Tahun

Berdasarkan pertimbangan terhadap analisa SWOT yang dilakukan maka kebijakan dan strategi dirumuskan dalam kerangka Sasaran Kegiatan dan Indikator yang telah ditetapkan seperti di dalam table tersebut di atas.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus diarahkan agar sesuai dengan tujuan dari kebijakan dan strategi yang hendak dicapai sehingga pada masa berakhirnya periode Rencana Strategis ini kinerja yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian maka arah kebijakan dan strategi PTKN dapat dilihat seperti dalam table berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
1	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	APK PTK/Ma'had Aly	meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	persentase peningkatan mahasiswa pada PTK	Kuliah Umum, Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran, Seminar Jurusan/Prodi/Pascasarjana	Persentase mahasiswa PTKH yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
					Pelaksanaan Diklat Moderasi Beragama	Persentase dosen PTKH yang dibina dalam moderasi beragama
					Bidik Misi, Beasiswa Mahasiswa Miskin, Beasiswa KIP	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidik Misi pada PTKH
					Beasiswa PPA	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA pada PTKH
					Pendataan melalui tracer study	Persentase mahasiswa PTKH berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3
2	Meningkatnya Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan	PTK/Ma'had Aly yang Terakreditasi A/Unggul	meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	persentase PTKH yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	Bantuan Pembelajaran Daring dan WFH	Persentase PTKH yang menyelenggarakan pembelajaran daring
					Penyusunan modul pembelajaran daring	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Persentase PTKH yang memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan
					Penyusunan dan Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi,	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
					Kegiatan-kegiatan dalam Output Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Seperti pelaksanaan Audit Mutu Internal	Persentase PTKH yang menerapkan budaya mutu
					Bantuan Operasional Lembaga Kemahasiswaan	Persentase Mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
					Penguatan Lembaga Penjamin mutu Internal	Persentase PTKH yang memperoleh pembinaan dalam SPMI
					Peningkatan sumber-sumber potensial PNB pada Lembaga	Persentase anggaran PNB dan PNBBLU pada PTKH terhadap seluruh sumber dana
					Peningkatan jumlah Student Body	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN
3	Menguatnya Pendidikan Tinggi yang Berkualitas	Presentase PTK yang Memiliki Prodi Kelas Internasional	meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional		Persentase Program Studi PTKH yang memenuhi standar akreditasi internasional
						Persentase PTKH yang melakukan kolaborasi Internasional
						Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran
						Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi
4	Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan	Presentase Penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy)	meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	Yudisium, Wisuda	Persentase lulusan yang tepat waktu
						Rerata lama masa studi Mahasiswa
			meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	persentase Dosen bersertifikat pendidik	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase dosen PTKH yang memperoleh peningkatan kompetensi
					persentase dosen berkualifikasi S3	Persentase tenaga kependidikan PTKH yang memperoleh peningkatan kompetensi
4	Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan	Presentase Penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy)	meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Peningkatan Mutu Penelitian Individual, Peningkatan Mutu	Persentase hasil Penelitian PTKH yang memperoleh HAKI
						Persentase hasil Penelitian PTKH yang memperoleh Hak Paten

Dari table diatas, arah strategis IAHN Gde Pudja pada kurun waktu 2020-2024 adalah merupakan *breakdown* dari sasaran strategis Kementerian Agama yang diturunkan dalam sasaran Program Eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Dari proses *cascading* tersebut dapat disimpulkan indikator kinerja utama (IKU) yang dimunculkan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di IAHN selama kurun periode ini diarahkan untuk dapat sejauh-jauhnya memenuhi indikator-indikator tersebut. Secara proses birokratis, indikator kinerja utama yang dicanangkan sejatinya adalah merupakan Indikator Kinerja Output yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Hindu seperti table di bawah ini:

No	IKU	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3

1	Persentase Mahasiswa PTKH yang Dibina dalam Moderasi Beragama	Ditetapkannya mata kuliah yang mengandung muatan moderasi beragama
		Dirumuskannya kegiatan pembinaan moderasi beragama untuk Dosen
		Disediakannya sarana dan prasarana pembelajaran daring meliputi peralatan, bantuan kuota dan bahan pembelajaran
2	Persentase PTKH yang memenuhi Standar Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi	Disusun dan ditetapkannya Rencana Induk Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan standard nasional pendidikan
		Koordinasi dengan bank persepsi tentang kondisi rekening Mahasiswa
3	Peresentase Mahasiswa PTKH Penerima Beasiswa PPA	Koordinasi dengan bank persepsi tentang kondisi rekening Mahasiswa
		Adanya MoU dengan PT lain yang memiliki Prodi S3 dengan IAHN Gde Pudja Mataram untuk dapat menerima lulusan S2 cumlaude IAHN Gde Pudja Mataram

4	Persentase Prodi PTKH yang Menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	Ditetapkannya pedoman pelaksanaan Sistem Kampus Merdeka
		Melanjutkan pelatihan SPMI untuk membentuk personil yang mampu menjalankan tugas dan fungsi SPMI
		Menghitung kembali pembiayaan operasional UKM untuk dapat memadai pembiayaan latihan dan keikutsertaan Mahasiswa dalam kompetisi
		Ditetapkannya SOP dan/atau peraturan lainnya tentang pelaksanaan SPMI
5	Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	Ditetapkannya regulasi tarif penggunaan BMN sebagai sumber PNBP
		Kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Hindu untuk mendata Calon Mahasiswa
		Regulasi tentang kerjasama lanjutan dengan Universitas di Luar Negeri
		Pembentukan Progran Studi PPG (Pendidikan Profesi Guru)
		Pembentukan program studi jenjang DIII (Diploma III)
		Pengembangan Program Studi pada jenjang S1 (Strata 1), S2 (Magister), dan S3 (Doktor)
6	Persentase PTKH yang melakukan Kolaborasi Internasional	Kolaborasi internasional dalam bentuk penelitian cross- country
		MoU kerjasama Pendidika dan Pengajaran dengan Universitas Luar Negeri melalui Daring

7	Persentase Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	MoU kerjasama Penelitian dengan Universitas Luar Negeri melalui Daring untuk melakukan PM bersama di NTB
8	Persentase Penelitian yang menghasilkan HaKI	Dirumuskannya penelitian inventif yang menghasilkan HaKI

Untuk dapat mengaktualisasikan arah kebijakan tersebut diatas maka perlu dicanangkan strategi yang disertai dan kerangka regulasi sebagai pendukungnya. Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung strategi yang ditetapkan dapat dilihat dalam table berikut:

STRATEGI	KERANGKA REGULASI
Dimasukkannya muatan moderasi agama ke dalam mata kuliah	Ditetapkannya mata kuliah yang mengandung muatan moderasi beragama
Sounding tentang visi Kementerian Agama untuk mewujudkan cara beragama yang moderat dan moderasi pengajaran agama	Dirumuskannya kegiatan pembinaan moderasi beragama untuk Dosen
Dilaksanakannya pembelajaran daring dengan fasilitas dan prasarana yang dimiliki oleh Dosen dan Mahasiswa menggunakan aplikasi media sosial seperti W.A dan google form	Disediakannya sarana dan prasarana pembelajaran daring meliputi peralatan, bantuan kuotadan bahan pembelajaran
Dilaksanakannya diklat AA yang merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi Dosen	Dilaksanakannya diklat kompetensi lanjutan kompetensi Dosen seperti diklat AA tingkat Advance dan berkelanjutan
Tenaga Kependidikan yang sudah menjadi JFT sudah mendapat diklat kompetensi dari instansi pembina namun tenaga kependidikan yang masih menjabat JFU belum bisa mendapatkan diklat sesuai dengan posisinya	Disusunnya rencana induk diklat tenaga kependidikan untuk mencapai standar kompetensi tenaga pendidikan yang dibutuhkan
Lembaga telah memiliki RKBMN namun belum mewakili sepenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana	Disusun dan ditetapkannya Rencana Induk Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan standard nasional pendidikan

Diberlakukannya persyaratan pernyataan bank tentang rekening aktif	Koordinasi dengan bank persepsi tentang kondisi rekening Mahasiswa
Diberlakukannya persyaratan pernyataan bank tentang rekening aktif	Koordinasi dengan bank persepsi tentang kondisi rekening Mahasiswa
Bekerjasama dengan PT lain yang memiliki Prodi S3 untuk menerima lulusan cum laude S2 IAHN Gde Pudja Mataram	Adanya MoU dengan PT lain yang memiliki Prodi S3 dengan IAHN Gde Pudja Mataram untuk dapat menerima lulusan S2 <i>cumlaude</i> IAHN Gde Pudja Mataram
Lembaga telah berusaha agar masing-masing prodi memenuhi syarat untuk akreditasi dengan mengusahakan syarat minimal sarana dan prasarana, pembagian kegiatan akademis dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.	Disosialisasikannya Standar Nasional Akreditasi Prodi untuk kemudian dituangkan dalam rencana kerja prodi untuk mencapai syarat minimal akreditasi
Diterapkannya Sistem Kampus Merdeka	Ditetapkannya pedoman pelaksanaan Sistem Kampus Merdeka
Ditetapkannya LPM beserta tugas dan fungsinya	Melanjutkan pelatihan SPMI untuk membentuk personil yang mampu menjalankan tugas dan fungsi SPMI
Pembiayaan operasional UKM	Menghitung kembali pembiayaan operasional UKM untuk dapat memadai pembiayaan latihan dan keikutsertaan Mahasiswa dalam kompetisi
Dilakukannya pelatihan mandiri SPMI	Ditetapkannya SOP dan/atau peraturan lainnya tentang pelaksanaan SPMI
Dilaksanakannya PNBPN hanya dari satu sumber fungsional yaitu biaya Pendidikan	Ditetapkannya regulasi tarif penggunaan BMN sebagai sumber PNBPN
Dilaksanakannya promosi lembaga dan sosialisasi PMB dan pembukaan prodibaru untuk menambah Mahasiswa	Kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Hindu untuk mendata Mahasiswa potensial
MoU dengan Universitas luar negeri	Regulasi tentang kerjasama lanjutan dengan Universitas di Luar Negeri
	Kolaborasi internasional dalam bentuk penelitian <i>cross-country</i>
	MoU kerjasama Pendidikan dan Pengajaran dengan Universitas Luar Negeri melalui Daring

	MoU kerjasama Penelitian dengan Universitas Luar Negeri melalui Daring
	MoU kerjasama Penelitian dengan Universitas Luar Negeri melalui Daring untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat bersama di NTB
Diwajibkan Dosen untuk membiayai pengurusan HaKI dari dana Hibah Penelitian	Membentuk tim HaKI yang bertugas untuk mengurus dan menginventarisir HaKI dari hasil penelitian Dosen
Diberinya bantuan pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu	Ditetapkannya keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi Mahasiswa agar dapat menyelesaikan study
Surat Keputusan <i>Drop Out</i> , pedoman akademik	Diterapkannya pengawasan yang lebih melekat dari Dosen PA terhadap Mahasiswa menyangkut masa kuliah
Bertambahnya jumlah aset, tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin	Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi

Dalam mencapai hal-hal tersebut maka penguatan kerangka kelembagaan mutlak menjadi hal yang diperlukan. Dengan demikian, pembagian kewenangan kepada unit-unit yang merupakan leading sektor dalam melakukan kegiatan menjadi urgensi yang harus segera dapat diwujudkan. Penguatan lembaga dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan:

1. Membentuk unit-unit baru yang melaksanakan tugas dan fungsi khusus yang berkaitan dengan strategi yang telah ditetapkan.
2. Memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap unit-unit yang sudah tersedia dimana perluasan kewenangan tersebut diarahkan untuk dapat melakukan percepatan pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan.
3. Melakukan analisa beban kerja unit *leading sector* untk mendapatkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas penambahan sumber daya manusia.
4. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja untuk percepatan pencapaian kinerja.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. Target Kinerja**

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan IAHN Gde Pudja Mataram 2020-2024 yang masuk dalam Program Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dapat dilihat dari table berikut:

MATRIK TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN TAHUN 2020-2024

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	SAT.	TARGET					ALOKASI					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu												
Program Pendidikan Tinggi												
Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu							19.756.246	22.340.375	15.756.975	15.660.975	16.880.367	
Prodi PTK Terakreditasi A		2	4	4	4	4	819.771	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
PIP Kuliah		100	150	200	250	250	660.000	1.650.000	2.640.000	2.970.000	3.630.000	
Beasiswa Bidik Misi		88	60	50	30	15	1.161.600	660.000	660.000	396.000	198.000	
Beasiswa Mahasiswa Miskin		80	60	60	60	60	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik		180	200	200	200	200	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Kualifikasi Dosen S3		6	6	6	6	6	459.375	459.375	459.375	459.375	459.375	
Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan ke luar Negeri					2	2				150.000	150.000	
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN)		1	1	1	1	1	2.793.000	1.568.000	1.724.000	1.897.280	2.087.008	
Sarana Bidang Pendidikan			1	1	1	1		3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Prasarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu		1	1	1	1	1	10.000.000	8.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
Pembinaan Peserta Didik		760	784	810	850	890		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya		101	101	101	101	101	1.053.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu		1	1	1	1	1	800.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	
Pengabdian Masyarakat		28	28	28	28	28	256.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang Dilakukan			1	1	1	1		300.000	300.000	300.000	300.000	
Lulusan Perguruan Tinggi Hindu yang Dibina			100	100	100	100		150.000	200.000	250.000	300.000	
Penelitian yang berkualitas		36	36	36	36	36	1.103.000	1.103.000	1.323.600	1.588.320	1.905.984	

Tabel 4.1. Matrik Target Kinerja dan Pendanaan tahun 2020-2024

Target kinerja dan kerangka pendanaan seperti tampak dalam table 4.1 merupakan hasil *breakdown* dari target kinerja yang ditetapkan oleh Eselon I menjadi target institusi dan kewajiban untuk mencapainya.

Target kinerja tersebut kemudian dapat diterjemahkan ke dalam indikator-indikator yang telah ditentukan sebagai indikator kinerja pencapaian sasaran program seperti tabel selanjutnya. Pencapaian indikator kinerja tersebut adalah merupakan perhitungan akumulasi dari detail kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap rencana strategis Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

No	Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Terget Kinerja (2024)	Penanggung Jawab
1.	SP 11.4	Partisipasi dalam penyelenggaraan dialog lintas agama	Jumlah dialog lintas agama dalam bentuk seminar dan sejenisnya	4	4	Warek I
2.	SP 11.5	Meningkatnya kualitas administrasi dan literatur Keagamaan	Jumlah lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat pengelola rumah ibadah dan pengelola perpustakaan rumah ibadah sebagai bentuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	36	60	LP2M
			Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan di ruang publik melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pemanfaat Laboratorium siaran serta Media Sosial Lembaga	0	4	Warek I/ Kepala Lab.Siaran
			Jumlah terjemahan dan kajian lontar keagamaan	16	20	Warek I/ Pusat Kajian Lontar
3	SP 11.7	Menguatnya sistem pendidikan yang berprespektif moderat	Kegiatan Evaluasi Kurikulum dan Pembaharuan Kurikulum menuju kurikulum bermuatan Moderasi Beragama	1	1	Warek I
			Jumlah kegiatan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan bertema moderasi agama	4	4	Warek I
4	SP 11.9	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Sistem layanan kepegawaian untuk Dosen yang belum bersertifikat Pendidik	0	1	Warek II
			Mapping Data keilmuan Dosen	0	1	Kabiro AUAK
			Pemberian Bantuan Biaya Kuliah S3 Dosen	7	15	Warek I dan Warek II
			Jumlah Dosen tersertifikasi			Warek II
5	SP 11.10	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	PIP Kuliah	175	375	Warek I dan Warek II
			Jumlah Penerima Beasiswa Bidik Misi	80	40	Warek I dan Warek II
			Jumlah Penerima Beasiswa Mahasiswa Miskin	200	200	Warek I dan Warek II
			Jumlah Penerima Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	200	300	Warek I dan Warek II
			BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri)	1.568.000.000	2.700.000.000	Warek I dan Warek II
6	SP 11.12	Meningkatnya standar dan kualitas penjaminan mutu pendidikan	Jumlah Kegiatan Penguatan struktur dan pembiayaan kegiatan LPM PTKH	4	4	LPM
			Kegiatan Penyusunan data base PTKH	0	4	Kabiro AUAK
			Jumlah bahan ajar daring	0	100	Warek I
			Jumlah Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran daring	4	8	Warek II
7	SP 11.14	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi Internasional				
8	SP 11.15	Meningkatnya kualitas Lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja	Masa tunggu lulusan	6	6	Kabag Umum/ Kabiro AUAK
9	SP 11.16	Meningkatnya kualitas pemanfaatan Penelitian	Jumlah penelitian yang dihasilkan	200	200	LP2M
10	SP 11.17	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang Efektif dan Akuntabel	Jumlah layanan perkantoran yang disediakan	1	1	Kabiro AUAK

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan IAHN Gde Pudja dan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan IAHN Gde Pudja Mataram berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional. Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran IAHN Gde Pudja Mataram sampai dengan 2024 pada tabel berikut sebagai berikut.

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	SAT.	ALOKASI PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu						
Program Pendidikan Tinggi						
Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu		19.756.246	22.340.375	15.756.975	15.660.975	16.880.367
Prodi PTK Terakreditasi A		819.771	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PIP Kuliah		660.000	1.650.000	2.640.000	2.970.000	3.630.000
Basiswa Bidik Misi		1.161.600	660.000	660.000	396.000	198.000
Basiswa Mahasiswa Miskin		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik		450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kualifikasi Dosen S3		459.375	459.375	459.375	459.375	459.375
Mahasiswa Penerima Basiswa Pendidikan ke luar Negeri					150.000	150.000
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN)		2.793.000	1.568.000	1.724.000	1.897.280	2.087.008
Sarana Bidang Pendidikan			3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Prasarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu		10.000.000	8.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Pembinaan Peserta Didik			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya		1.053.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu		800.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000

Pengabdian Masyarakat		256.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang Dilakukan			300.000	300.000	300.000	300.000
Lulusan Perguruan Tinggi Hindu yang Dibina			150.000	200.000	250.000	300.000
Penelitian yang berkualitas		1.103.000	1.103.000	1.323.600	1.588.320	1.905.984

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2020-2024 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang agama Hindu dan pendidikan agama dan Keagamaan Hindu. Renstra Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram memuat target-target yang selaras dengan Renstra Kementerian Agama dan Renstra Ditjen Bimas Hindu yang menjabarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSP dan IKSK, untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*Outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Satuan kerja agar menjadikan Renstra ini sebagai dasar dan acuan dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana Aksi. Renstra ini agar diinternalisasikan kepada seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana pada satuan kerja yang melaksanakan peran bimbingan masyarakat Hindu. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus dilakukan secara berjenjang dan berkala untuk mendapatkan informasi capaian target Renstra.

Mataram , 22 April 2022

Rektor IAHN Gde Pudja Mataram

Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Si.  
NIP. 196608052003121002